

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta mengarahkan pembagian pendapatan agar lebih merata. Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM), harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran serta menyediakan kesempatan kerja yang luas bagi penduduk guna meningkatkan kemakmuran suatu masyarakat. Kondisi pembangunan perekonomian pada suatu negara berkembang pada umumnya menunjukkan bahwa kemampuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dinilai sangat rendah, sehingga tidak dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk. Padahal sebenarnya target dari pembangunan ekonomi adalah mengurangi dan memecahkan permasalahan yang terkait dengan pengangguran.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang sangat padat dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi sering menghadapi permasalahan terkait penyediaan lowongan kerja bagi penduduknya (Sumarsono, 2009). Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat apabila tidak dibarengi dengan peningkatan lowongan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja, maka secara otomatis akan berdampak terhadap

masalah ketenagakerjaan, seperti semakin tingginya angka pengangguran yang dapat meningkatkan probabilitas kemiskinan, kriminalitas, dan fenomena sosial ekonomi di masyarakat (Wahyuni, 2005 dalam Mahroji, 2019).

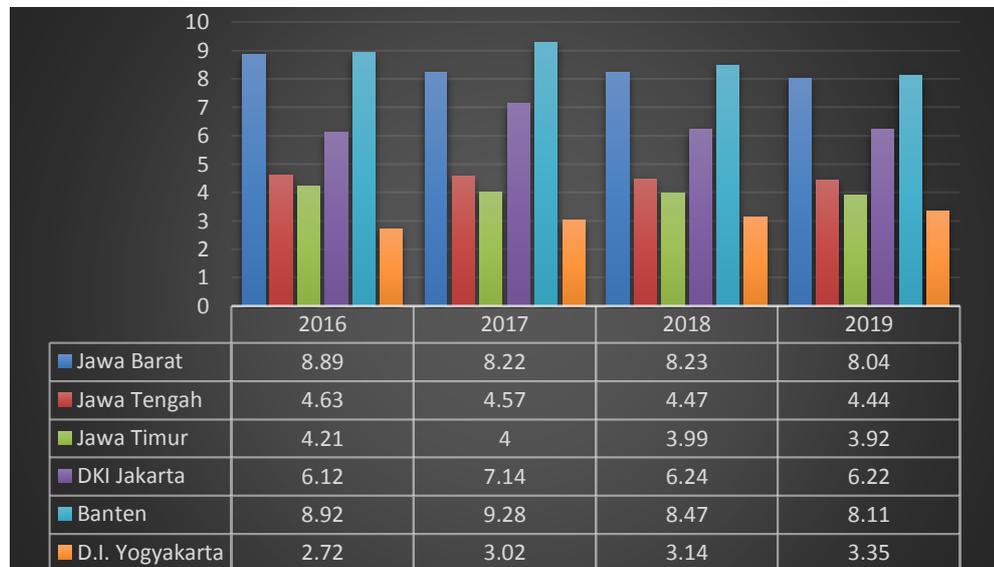
Indonesia memiliki berbagai masalah sebagaimana permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang pada umumnya. Salah satu permasalahan yang dihadapi berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia adalah masalah pengangguran. Menurut Sonny Sumarsono (2009), pengangguran adalah suatu kondisi di mana seseorang yang telah memasuki angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik, pengangguran menjadi masalah yang sangat kompleks, karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak mudah dipahami. Indonesia sendiri juga merupakan salah satu dari negara berkembang yang memiliki masalah berupa jenis pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang disebabkan oleh kurangnya ketersediaan lowongan pekerjaan yang tidak sesuai dengan jumlah pertambahan tenaga kerja. Hal tersebut menyebabkan semakin tingginya jumlah tenaga kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan, sehingga sebagian dari mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu (Sukirno, 2010).

Besarnya angka pengangguran dapat dikatakan sangat penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Permasalahan pengangguran juga dialami oleh seluruh wilayah di Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu dari 34 provinsi yang ada

di Indonesia, yang memiliki jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia sebesar 49.31 juta jiwa. Banyaknya jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat sendiri bisa menimbulkan salah satu masalah ekonomi yang cukup signifikan, salah satunya adalah masalah ekonomi yang erat hubungannya dengan banyaknya jumlah penduduk, yaitu tingginya angka pengangguran. Masalah tingginya angka pengangguran ini merupakan masalah yang selalu menjadi persoalan bangsa Indonesia yang sulit untuk dipecahkan. Hal ini mengingat jumlah kepadatan penduduk Indonesia yang terus bertambah dan tidak diiringi dengan tingginya permintaan akan tenaga kerja dan kurangnya jumlah lapangan pekerjaan yang ada, seperti halnya di Provinsi Jawa Barat sendiri.

Jenis pengangguran yang paling tinggi di Provinsi Jawa Barat adalah jenis pengangguran terbuka. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang ada di Jawa Barat persentasenya mencapai 7,73% atau sekitar 527.186 orang. Menurut Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat angkanya lebih tinggi dari angka nasional yang sebesar 5,01%. Tingkat pengangguran terbuka pada bulan Februari 2019 sebesar 6,82 juta orang atau turun 50.000 orang dibandingkan dengan bulan Februari 2018 yang berjumlah 6,87 juta orang. Jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Pulau Jawa, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pengangguran yang cukup tinggi atau paling tertinggi kedua setelah Provinsi Banten. Di Pulau Jawa sendiri tingkat pengangguran terbuka paling tinggi adalah Provinsi Banten dan paling rendah adalah Provinsi

D.I. Yogyakarta. Gambar 1.1 menyajikan data tentang tingkat pengangguran terbuka di enam provinsi pada Pulau Jawa tahun 2016-2019.



Grafik 1.1 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa Tahun 2016-2019 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

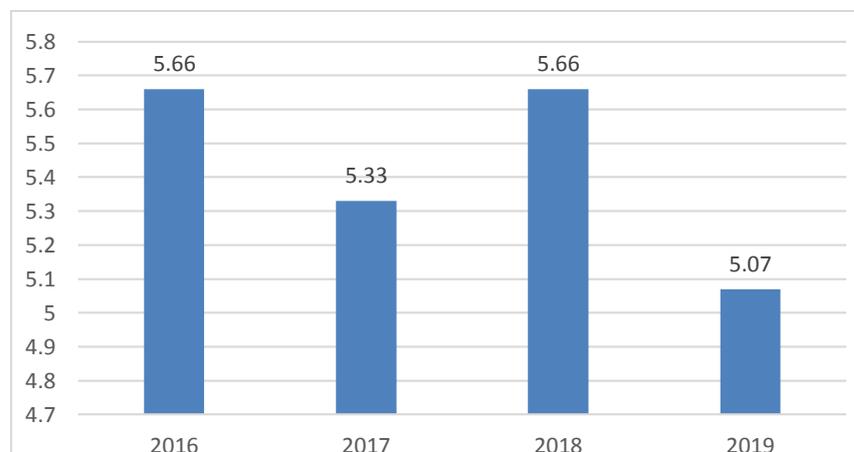
Dilihat pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat fluktuatif. Dimulai pada tahun 2016 tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,89%. Lalu, pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 8,22%. Selanjutnya, pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 8,23%. Di tahun terakhir, yakni pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali sebesar 8,04%. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten tertinggi di tahun 2017 sebesar 9,28%. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta tertinggi di tahun 2017 sebesar 7,14%. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah tertinggi di tahun 2016 sebesar 4,63%. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur tertinggi di tahun 2016 sebesar 4,21%. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi D.I.Yogyakarta

tertinggi di tahun 2017 sebesar 3,35%. Naik turunnya angka pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat selama empat tahun ini menjadi tugas penting untuk pemerintah daerah setempat dalam menyelesaikan permasalahan terkait pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat dengan berbagai program yang telah dibentuk dalam proses pembangunan ekonomi.

Salah satu indikator ekonomi yang berpengaruh terhadap pengangguran adalah laju pertumbuhan ekonomi. Ketika laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah menurun, maka kinerja pembangunan ekonomi di suatu daerah akan terhambat dan otomatis masalah ekonomi seperti pengangguran akan meningkat jumlahnya. Proses lajunya pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), sehingga tingkat perkembangan PDRB perkapita yang dicapai masyarakat seringkali sebagai ukuran kesuksesan suatu daerah dalam mencapai cita-cita untuk menciptakan pembangunan ekonomi (Sukirno, 1981). Secara makro pertumbuhan dan peningkatan PDRB dari tahun ke tahun merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan daerah yang dapat dikategorikan dalam berbagai sektor ekonomi, yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, perhotelan dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa lainnya. Semakin besar sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB suatu daerah, maka akan dapat melaksanakan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui indikator PDRB yang berarti pula

akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tiap daerah, maka peran pemerintah daerah sangat diperlukan, yaitu seperti pembuatan strategi dan perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan pergeseran sektor ekonomi dari tahun ke tahun.

Perekonomian Provinsi Jawa Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2019 mencapai Rp544,56 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp380,26 triliun. BPS menyebutkan bahwa dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 14,88%. Dari sisi pengeluaran dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 9,80%. Berikut pada gambar 1.2 merupakan perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016-2019.



Grafik 1.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan gambar 1.2 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat fluktuatif. Pada tahun 2016-2019 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat terbilang positif dengan rata-rata sebesar 5,43%. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat sebesar 5,66%. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan menjadi 5,07%, hal ini disebabkan oleh menurunnya konsumsi rumah tangga dan perubahan inventori serta perlambatan ini juga dipengaruhi *base effect*, di mana pada triwulan III 2016 terdapat pelaksanaan PON XIX Jawa Barat. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan kembali sebesar 5,66%, hal ini disebabkan oleh tingginya dari komponen lapangan usaha di sektor *real estate* sebesar 9,64% dan dari komponen pengeluaran konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) sebesar 16,38% dimana Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) merupakan unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Bentuk organisasi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) yaitu: organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan partai politik, organisasi sosial (Orsos), organisasi profesi (Orprof), perkumpulan sosial/kebudayaan/olah raga/hobi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga keagamaan, organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan kembali sebesar 5,07%, hal ini disebabkan oleh

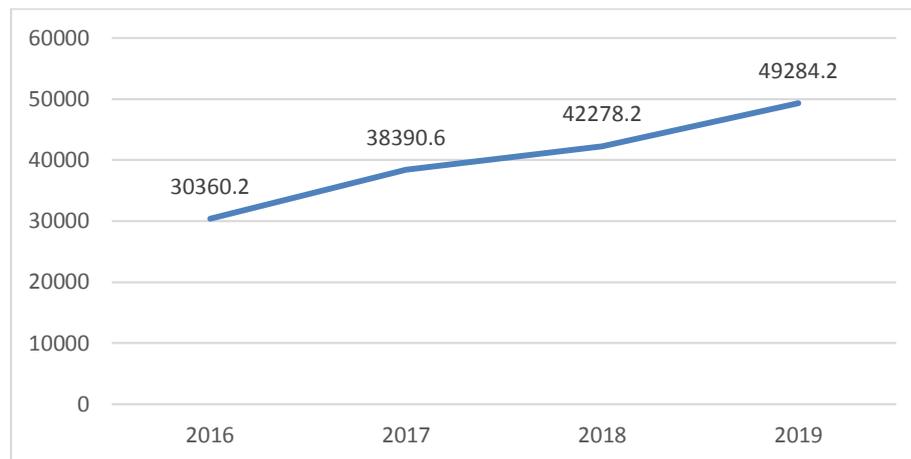
penurunan sektor industri pengolahan yang makin melemah, yaitu sebesar 3,8% dan tiga sektor lainnya, seperti sektor perdagangan 4,62%, sektor pertanian 3,88%, dan sektor konstruksi 5,76%.

Dalam teori ekonomi makro, dari sisi pengeluaran, pendapatan regional bruto adalah penjumlahan dari berbagai variabel termasuk di dalamnya adalah investasi yang dipengaruhi oleh penanaman dalam negeri dan disertai dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga akan membawa dampak terhadap penyerapan tenaga kerja baik terdidik, tenaga terlatih, maupun tenaga kerja kasar. Investasi merupakan sebagian dari indikator dalam meningkatkan atau menurunkan angka pengangguran di suatu daerah. Investasi sendiri juga dapat mendorong peningkatan pendapatan perkapita masyarakat suatu daerah. Pertumbuhan pendapatan perkapita menjadikan masyarakat tidak hanya memenuhi kebutuhan primer, namun kebutuhan sekunder maupun tersier dapat dipenuhi. Hal inilah yang akan memicu berkembangnya berbagai aktivitas perekonomian di daerah.

Penanaman modal merupakan langkah awal untuk melakukan suatu proses pembangunan ekonomi. Penanaman modal yang berasal dari dalam negeri disebut Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDA). Tingginya PMDA akan membawa dampak positif, yaitu antara lain dari sisi penawaran, investasi tersebut akan menyediakan beragam produk yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat, sedangkan dari sisi permintaan, investasi membuka lapangan pekerjaan baru yang berakibat meningkatnya pendapatan masyarakat serta menguatkan daya beli masyarakat. Pertemuan dua sisi itulah yang akan

menggerakkan kegiatan ekonomi secara terus menerus dan dapat menekan masalah ekonomi seperti pengangguran.

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi tujuan investasi di Indonesia yang cukup banyak dituju oleh para investor. Sektor manufaktur dan jasa merupakan dua sektor yang menjadi daya tarik investasi di Provinsi Jawa Barat, di mana laju pertumbuhan investasi sektor jasa lebih cepat dibandingkan sektor-sektor lainnya. Perkembangan investasi di Provinsi Jawa Barat yang terus meningkat diikuti oleh penyerapan tenaga kerja yang cukup besar, hal ini secara langsung dapat meminimalisir tingginya angka pengangguran di Provinsi Jawa Barat. Baik besaran dari investasi, jumlah tenaga kerja, maupun jumlah proyek berkembang dan menyebar tidak hanya ke beberapa daerah saja, akan tetapi keseluruh wilayah yang ada di Provinsi Jawa Barat. Jika pada tahun 2007 besaran investasi hanya ada di sekitar jakarta (Bodebek), kemudian seiring bertambahnya tahun menyebar keseluruh wilayah, walaupun investasi terbesar ada di Bodebekapur, Bandung Raya, dan Cirebon Raya. Jumlah tenaga kerja dan proyek relatif lebih terkonsentrasi pada wilayah Bodebekapur, Sukabumi, Cianjur, dan Bandung Raya. Berikut pada gambar 1.3 merupakan perkembangan realisasi investasi domestik di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2019.



Grafik 1.3 Perkembangan Realisasi Investasi Domestik di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019 (Milyar Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah

Berdasarkan gambar 1.3 dapat dilihat bahwa dari tahun 2016-2019 investasi domestik terbilang positif dengan rata-rata kenaikan sebesar 40.078 Milyar Rupiah. Pada tahun 2016 investasi domestik di Provinsi Jawa Barat sebesar 30.360,2 Milyar Rupiah. Lalu, pada tahun 2017 investasi domestik meningkat menjadi sebesar 38.390,6 Milyar Rupiah. Selanjutnya, pada tahun 2018 terjadi peningkatan lagi seperti di tahun sebelumnya, yaitu menjadi sebesar 42.278,2 Milyar Rupiah. Untuk di tahun terakhir, yakni tahun 2019 terjadi peningkatan lagi menjadi sebesar 49.284,2 Milyar Rupiah. Pada tahun 2016-2019 investasi domestik di Provinsi Jawa Barat tidak mengalami pemasalahan dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pola investasi di Provinsi Jawa Barat memiliki dampak yang signifikan dalam peningkatan PDRB dan pendapatan per kapita. Agar investasi yang masuk bersifat inklusif, maka seharusnya peningkatan investasi harus bisa mendorong peningkatan kesempatan kerja, pengurangan ketimpangan daerah, pengurangan kesenjangan pendapatan antar golongan masyarakat, serta pengurangan

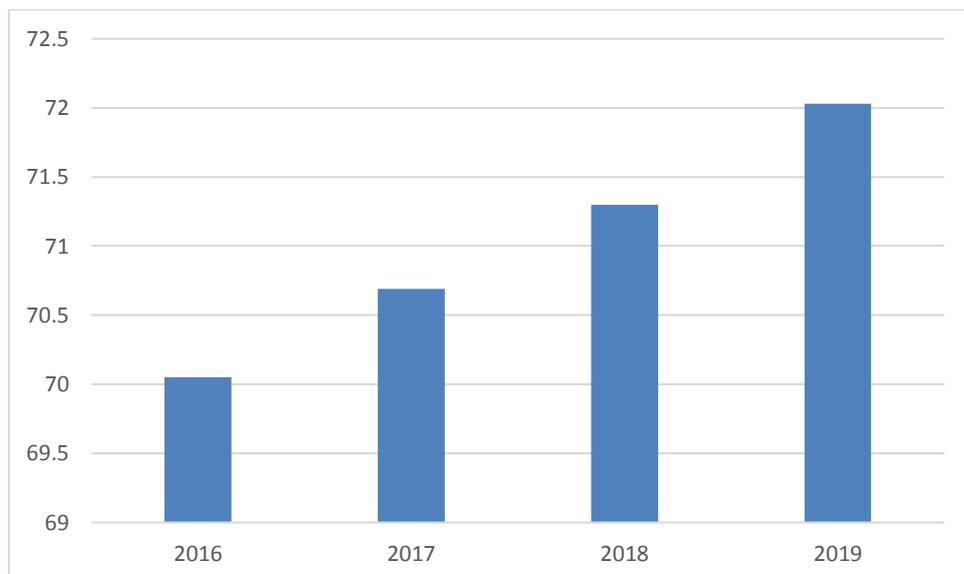
kemiskinan. Peningkatan investasi di Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun menghasilkan dampak positif terhadap pengurangan pengangguran. Oleh sebab itu, alokasi investasi di Provinsi Jawa Barat dianggap cukup efektif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hubungan indeks pembangunan manusia dengan pengangguran memiliki keterkaitan yang sangat erat, karena pembangunan manusia sendiri merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan manusia berperan penting dalam membentuk kemampuan suatu daerah agar mampu mengimplementasikan teknologi modern untuk mengembangkan kapasitasnya dalam menciptakan kesempatan kerja guna menurunkan jumlah angka pengangguran. Maka dengan begitu, jika semakin banyak angkatan kerja yang terserap dengan baik ke dalam pasar kerja diharapkan mereka mampu mensejahterakan kehidupannya.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) juga menjelaskan bahwa indeks pembangunan manusia mempunyai beberapa manfaat sebagai salah satu bagian dari perekonomian, yaitu merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, dapat menentukan peringkat serta level pembangunan suatu negara atau daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) juga menjelaskan bahwa indeks pembangunan manusia dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Hal ini menunjukkan bahwa tiga dimensi tersebut penting dalam pembangunan manusia dan menjadi indikator untuk menilai kualitas sumber daya manusia

yang siap untuk berkerja, sehingga mampu mengurangi tingginya tingkat pengangguran di suatu daerah.

Kualitas hidup manusia di Provinsi Jawa Barat terus mengalami kemajuan, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2019 IPM Provinsi Jawa Barat telah mencapai 72,03%. Angka ini meningkat 0,739 poin dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 71,30% dan saat ini sudah diatas IPM nasional yang sebesar 71,92%. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar, sejak tahun 2016 IPM di Provinsi Jawa Barat berada pada status tinggi dan saat ini menempati peringkat ke-10 secara nasional di bawah DKI, DIY, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Bali, Riau, Sulawesi Utara, Banten, dan Sumatera Barat. Berikut pada gambar 1.4 merupakan perkembangan IPM di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2019.



Grafik 1.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2019 (Persen)

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan gambar 1.4 dapat dilihat bahwa dari tahun 2016-2019 IPM di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2016 IPM di Provinsi Jawa Barat sebesar 70,05%. Lalu, pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi sebesar 70,69%. Selanjutnya, pada tahun 2018 terjadi peningkatan lagi seperti di tahun sebelumnya, yaitu menjadi sebesar 71,3%. Untuk di tahun terakhir, yakni tahun 2019 terjadi peningkatan lagi menjadi sebesar 72,03%.

Besaran IPM yang didapatkan oleh Provinsi Jawa Barat didasarkan pada perhitungan yang melibatkan tiga komponen utama, meliputi umur yang panjang dan hidup yang sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), pengetahuan oleh Harapan Lama sekolah (HLS), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sementara standar hidup layak diukur melalui pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Pada tahun 2019 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat UHH di Provinsi Jawa Barat mencapai 72,85% per tahun, sementara HLS mencapai 12,48% per tahun, RLS 8,37% per tahun, dan pengeluaran perkapita mencapai Rp11.152.000 per orang per tahun. Masing-masing komponen tersebut mengalami kenaikan dibanding pencapaian pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata harapan hidup anak yang baru lahir di Provinsi Jawa Barat dapat meraih usia 72,85 tahun, meningkat hingga 1 tahun dibanding 2010. Sementara, meningkatnya HLS menjadi indikasi positif bahwa penduduk di Provinsi Jawa Barat semakin dapat mengenyam bangku sekolah dalam waktu yang lama. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan

pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1. Selain itu, RLS menunjukkan bahwa pada tahun 2019 rata-rata penduduk di Provinsi Jawa Barat yang berusia 25 tahun telah bersekolah selama 8,37 tahun atau setara kelas VII. Adapun pengeluaran per kapita penduduk Provinsi Jawa Barat selama 9 tahun terakhir meningkat sebesar 2,20% per tahun.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang sudah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang indikator-indikator yang berhubungan dengan penyebab meningkat atau menurunnya pengangguran, yaitu seperti pertumbuhan ekonomi, investasi domestik, dan indeks pembangunan manusia. Maka dari itu, peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Domestik, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2019”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Investasi Domestik, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara parsial terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2019?
2. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Investasi Domestik, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara bersama-sama terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh Investasi Domestik terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Domestik, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2019.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan penelitian, manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis
Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang permasalahan yang diteliti, yaitu Pertumbuhan ekonomi, Investasi Domestik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pengangguran di Provinsi Jawa Barat.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dijadikan bahan sekaligus rekomendasi mengenai pengaruh variabel di atas khususnya kebijakan dalam mengurangi Tingkat Pengangguran.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, memberikan informasi, dan masukan atau rujukan untuk peneliti selanjutnya agar hasil penelitian menjadi lebih baik lagi.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian bertempat di Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan data sekunder, yaitu publikasi laporan melalui sumber terpercaya seperti Badan Pusat Statistik (BPS), serta dari *website* resmi Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM) dalam angka sumber relevan dengan kajian penelitian.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan selama 9 bulan, dimulai dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 jadwal penelitian digambarkan dalam matriks sebagai berikut.

